

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika. Gelar tersebut sering disebutkan oleh berbagai tokoh, mulai dari tokoh nasional hingga tokoh internasional. Salah satu indikator yang menjadi acuan adalah pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dengan memberi ruang bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk ikut serta memilih secara langsung orang-orang yang akan mengisi jabatan-jabatan publik, termasuk memilih secara langsung siapa yang akan menjadi kepala negara.

Keberhasilan menerapkan pemilihan umum secara langsung tidak dilalui tanpa perjuangan. Pada awalnya Indonesia berhasil melaksanakan pemilu pertama pada tahun 1955 yang oleh beberapa ahli dianggap sebagai pemilu paling demokratis. Tetapi pasca berakhirnya orde lama, Indonesia bisa dikatakan mengalami degradasi demokrasi selama kurang lebih 32 tahun ketika kepemimpinan berada di tangan Soeharto. Meskipun sempat melaksanakan enam kali pemilu, akan tetapi hal tersebut dipandang banyak kalangan sebagai suatu rekayasa politik yang dibangun rezim orde baru. Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi dalam bukunya menyebutkan bahwa enam kali pemilihan umum di bawah rezim orde baru ini bukanlah pemilihan umum yang memenuhi

syarat demokrasi. Pemilihan umum orde baru adalah salah satu dari mekanisme mobilisasi dan pencarian legitimasi secara semu rezim otoritarian orde baru.¹

Pasca berakhirnya orde baru pada tahun 1998, Indonesia kemudian melaksanakan pemilu pada tahun 1999. Pemilu ini dijadikan momentum kembalinya demokrasi di Indonesia. Hak-hak politik warga negara seperti kebebasan untuk berpendapat dan berserikat dipulihkan kembali. Setelah pemilu pada tahun 1999, Indonesia telah melaksanakan tiga kali pemilu yakni pada tahun 2004, 2009 dan 2014. Pemilu pada tahun 2004 menjadi pemilu pertama dimana rakyat Indonesia bisa memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung bisa dikatakan menjadi pengakuan tertinggi negara Indonesia terhadap kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945.² Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden teraktual baru saja dilaksanakan pada bulan Juli 2014.

Rangkaian pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dimulai dengan proses persiapan hingga pembukaan pendaftaran pada tanggal 18-24 Mei 2014. Pada tahapan ini diperoleh dua pasang calon yang mendaftar. Pasangan calon yang pertama adalah Prabowo Subianto yang berpasangan dengan

¹ Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat* (Bandung:Mizan Media Utama, 2012), hal.2.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*, BAB I, pasal 1.

Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) dan pasangan yang kedua adalah Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pada tahapan selanjutnya kedua pasangan calon ini dinyatakan lolos dari berbagai macam seleksi mulai dari kelengkapan berkas administrasi hingga pemeriksaan medis. Pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan nomor urut satu sedangkan pasangan Jokowi-JK mendapatkan nomor urut dua.

Tabel 1.1 Daftar Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019

| NO | Pasangan Calon | Partai Pengusung |
|----|--|---|
| 1 | H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa | <ul style="list-style-type: none"> • Partai Gerakan Indonesia Raya • Partai Amanat Nasional • Partai Keadilan Sejahtera • Partai Golongan Karya • Partai Persatuan Pembangunan • Partai Bulan Bintang |
| 2 | Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla | <ul style="list-style-type: none"> • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan • Partai Nasional Demokrat • Partai Kebangkitan Bangsa • Partai Hati Nurani Rakyat |

Sumber: Website Resmi KPU RI, <http://www.kpu.go.id/>

Tahapan puncak pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yakni pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 tanpa ada kendala yang berarti. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian mengumumkan dan menetapkan hasil rekapitulasi pemilihan umum Presiden 2014 pada tanggal 22 Juli 2014. Pasangan Jokowi-JK ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan 70.997.883 (tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga) suara atau 53,15% dari total suara sah sedangkan pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 (enam puluh dua

juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat) suara atau 46,85% dari total suara sah.

Tabel 1.2 Hasil Rekapitulasi Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014

| NO | PROVINSI | PRABOWO HATTA | % | JOKOWI JK | % | SUB TOTAL |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 1 | ACEH | 1.089.290 | 54,39% | 913.309 | 45,61% | 2.002.599 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 2.831.514 | 44,76% | 3.494.835 | 55,24% | 6.326.349 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 1.797.505 | 76,92% | 539.308 | 23,08% | 2.336.813 |
| 4 | RIAU | 1.349.338 | 50,12% | 1.342.817 | 49,88% | 2.692.155 |
| 5 | JAMBI | 871.316 | 49,25% | 897.787 | 50,75% | 1.769.103 |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 2.132.163 | 51,26% | 2.027.049 | 48,74% | 4.159.212 |
| 7 | BENGKULU | 433.173 | 45,27% | 523.669 | 54,73% | 956.842 |
| 8 | LAMPUNG | 2.033.924 | 46,93% | 2.299.889 | 53,07% | 4.333.813 |
| 9 | BANGKA BELITUNG | 200.706 | 32,74% | 412.359 | 67,26% | 613.065 |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | 332.908 | 40,37% | 491.819 | 59,63% | 824.727 |
| 11 | DKIJAKARTA | 2.528.064 | 46,92% | 2.859.894 | 53,08% | 5.387.958 |
| 12 | JAWA BARAT | 14.167.381 | 59,78% | 9.530.315 | 40,22% | 23.697.696 |
| 13 | JAWA TENGAH | 6.485.720 | 33,35% | 12.959.540 | 66,65% | 19.445.260 |
| 14 | DIY | 977.342 | 44,19% | 1.234.249 | 55,81% | 2.211.591 |
| 15 | JAWA TIMUR | 10.277.088 | 46,83% | 11.669.313 | 53,17% | 21.946.401 |
| 16 | BANTEN | 3.192.671 | 57,10% | 2.398.631 | 42,90% | 5.591.302 |
| 17 | BALI | 614.241 | 28,58% | 1.535.110 | 71,42% | 2.149.351 |
| 18 | NTB | 1.844.178 | 72,45% | 701.238 | 27,55% | 2.545.416 |
| 19 | NTT | 769.391 | 34,08% | 1.488.076 | 65,92% | 2.257.467 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 1.032.354 | 39,62% | 1.573.046 | 60,38% | 2.605.400 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 468.277 | 40,21% | 696.199 | 59,79% | 1.164.476 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 941.809 | 50,05% | 939.748 | 49,95% | 1.881.557 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 687.734 | 36,62% | 1.190.156 | 63,38% | 1.877.890 |
| 24 | SULAWESI UTARA | 620.095 | 46,12% | 724.553 | 53,88% | 1.344.648 |
| 25 | SULAWSITENGAH | 632.009 | 45,17% | 767.151 | 54,83% | 1.399.160 |
| 26 | SULAWESI SELATAN | 1.214.857 | 28,57% | 3.037.026 | 71,43% | 4.251.883 |
| 27 | SULAWESI TENGGARA | 511.134 | 45,10% | 622.217 | 54,90% | 1.133.351 |
| 28 | GORONTALO | 378.735 | 63,10% | 221.497 | 36,90% | 600.232 |
| 29 | SULAWESI BARAT | 165.494 | 26,63% | 456.021 | 73,37% | 621.515 |
| 30 | MALUKU | 433.981 | 49,48% | 443.040 | 50,52% | 877.021 |
| 31 | MALUKU UTARA | 306.792 | 54,45% | 256.601 | 45,55% | 563.393 |
| 32 | PAPUA | 769.132 | 27,51% | 2.026.735 | 72,49% | 2.795.867 |
| 33 | PAPUA BARAT | 172.528 | 32,37% | 360.379 | 67,63% | 532.907 |
| 34 | LUAR NEGERI | 313.600 | 46,26% | 364.257 | 53,74% | 677.857 |
| JUMLAH TOTAL | | 62.576.444 | 46,85% | 70.997.833 | 53,15% | 133.574.277 |

Sumber: Website Resmi KPU RI, <http://www.kpu.go.id/>

Pemilu di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari dinamika-dinamika yang mengiringi proses pelaksanaannya. Dinamika yang begitu hebat bisa disaksikan pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. Dinamika yang mewarnai pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 dapat dilihat melalui berbagai fenomena-fenomena seperti *black campaign* dan perlombaan *quick count*.

Black campaign menjadi salah satu strategi yang dimainkan oleh masing-masing tim sukses untuk membentuk opini publik agar tidak memilih lawan politiknya masing-masing. Calon nomor urut satu, Prabowo Subianto diserang dengan isu pelanggaran HAM di masa lalu, memiliki kewarganegaraan ganda dan juga isu memiliki hutang dengan jumlah yang sangat besar. Sedangkan calon nomor urut dua, Joko Widodo diserang dengan isu bahwa dirinya adalah Komunis, Tionghoa, non-Muslim hingga isu pemalsuan akta nikah.

Fenomena selanjutnya adalah perlombaan lembaga survei dalam melakukan *quick count* (hitung cepat), tidak kurang dari sepuluh lembaga survei melakukan hitung cepat pada hari pemungutan suara. Masing-masing lembaga survei mengklaim bahwa hasil hitung cepatnya adalah yang paling benar meskipun terdapat perbedaan mencolok dari hasil hitung cepat yang dilakukan oleh masing-masing lembaga survei tersebut. Selain fenomena-fenomena di atas masih banyak lagi fenomena menarik yang terjadi selama kurun waktu pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Berbagai dinamika yang mewarnai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 tentu menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Ada beberapa komponen di dalam pemilu yang jamak dikaji oleh para peneliti di Indonesia. Pertama adalah kontestan pemilu, contoh penelitian terkait dengan kontestan pemilu yang sering kita lihat adalah studi tentang strategi pemenangan.³ Selanjutnya adalah penyelenggara pemilu, contoh penelitian yang dilakukan antara lain seperti penelitian tentang kinerja KPU.⁴ Komponen berikutnya adalah pemilih, komponen ini adalah pokok pembahasan utama yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Studi tentang pemilih menurut peneliti menarik untuk dikaji karena dua faktor utama. *Pertama*, pemilih merupakan faktor terpenting bagi kontestan pemilu untuk memenangkan pemilu. Calon perseorangan atau partai politik mana yang berhasil menggaet pemilih terbanyak maka dapat dipastikan akan menjadi pemenang pemilu. *Kedua*, kondisi aktual saat ini menunjukkan bahwa pemilih cenderung dijadikan sebagai sarana eksploitasi sesaat bagi kontestan pemilu. Tindakan persuasif dan terkadang menjurus pada tindakan paksaan yang dilakukan kepada para pemilih oleh kontestan pemilu agar mereka mau menggunakan hak pilihnya tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang baik. Pemilih hanya digiring untuk memilih kontestan tertentu baik individu maupun partai politik tertentu tanpa adanya pemberian pengetahuan yang jujur mengenai

³ Salah satu studi tentang strategi pemenangan yang dibukukan adalah Anwar Arifin, *Pencitraan dalam politik: Strategi Pemenangan Pemilu Dalam Perspektif Komunikasi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Indonesia, 2006).

⁴ Salah satu studi tentang kinerja KPU yang dibukukan adalah Andi Samad Thahir, Djohermansyah Johan, M. Sarief Arief dan Ahamad Toha Almansur, *Kinerja KPU, Pengembangan SDM, dan Masyarakat Perkotaan* (Jakarta: Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan (PISKAP), 2000).

track record, kapasitas maupun kelebihan dan kekurangan dari kontestan tersebut. Tim sukses dari para kontestan lebih sibuk menyebarkan informasi negatif tentang lawan politiknya untuk membentuk persepsi pemilih.

Salah satu studi yang cukup populer dalam kajian politik terhadap pemilih dalam pemilihan umum di negara-negara demokrasi adalah studi perilaku memilih (*voting behavior*). Ada beberapa pertanyaan pokok dalam studi ini. *Pertama*, berkaitan dengan partisipasi dalam pemilu atau pemilihan Presiden (*voter turnout*): Seberapa banyak warga negara yang berpartisipasi dalam pemilihan umum? Mengapa seseorang memutuskan ikut serta atau absen dalam pemilihan umum? *Kedua*, berkaitan dengan pilihan warga terhadap partai politik atau calon anggota DPR/DPRD, DPD, atau calon Presiden: Partai apa atau calon mana yang dipilih seorang pemilih dalam pemilu atau pilpres? Mengapa dia memilih partai atau calon tersebut, dan mengapa tidak memilih partai atau calon yang lain? Dalam studi perilaku memilih, secara garis besar ada tiga model untuk menjawab pertanyaan tersebut: Model sosiologis, model psikologis dan model pilihan rasional atau ekonomi politik.⁵

Penelitian terkait dengan perilaku memilih sudah beberapa kali dilakukan oleh para peneliti di Indonesia. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi. Penelitian tersebut dimulai pada tahun 1999 dan terus berkelanjutan hingga pemilu tahun 2009. Hasil penelitian ini sendiri sudah dipublikasikan di jurnal akademik internasional dan dibukukan pada tahun 2012 dengan judul *Kuasa Rakyat*. Salah satu kesimpulan

⁵ Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi, *op. cit.*, hal.3-4.

menarik dari hasil penelitian ini adalah kecenderungan pemilih di Indonesia yang semakin rasional, hal ini ditandai dengan semakin sedikitnya warga yang merasa bahwa ikut pemilu merupakan kewajiban seorang warga negara yang baik (*civic duty*).⁶ Gejala lain yang menunjukkan semakin rasionalnya pemilih di Indonesia adalah ditinggalkannya alasan primordial dalam memilih calon atau partai. Sebagai contoh, meskipun mayoritas pemilih beragama Islam (88%), total perolehan suara partai Islam tidak pernah mencerminkan kekuatan mayoritas ini.⁷

Penelitian ini sendiri akan mendeskripsikan perilaku memilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam studi perilaku pemilih ini akan dipersempit hanya pada pertanyaan mengapa seseorang memilih salah satu kontestan dan tidak memilih kontestan yang lain. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih mengerucutkan lingkup penelitian dengan memilih warga Muhammadiyah sebagai objek penelitian. Pemilihan warga Muhammadiyah sendiri didasarkan pada sejarah partisipasi politik warga Muhammadiyah dalam suksesi kepemimpinan nasional yang oleh banyak kalangan dianggap cukup memberikan pengaruh yang signifikan.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam perpolitikan nasional bukan merupakan sesuatu yang baru. Menurut Syarifuddin Jurdi dalam bukunya *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik*,⁸ awal keterlibatan Muhammadiyah dalam politik ditandai dengan keaktifan K.H Ahmad Dahlan dalam Boedi Oetomo (BO)

⁶ *Ibid.*, hal.453.

⁷ *Ibid.*, hal.454.

⁸ Syarifudin Jurdi, *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik* (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2004), hal. 69-70.

dan Sarekat Islam. Persentuhan Muhammadiyah dengan pemilu sendiri bisa kita lihat pada saat Muhammadiyah menjadi anggota istimewa dari Masyumi yang notabene merupakan salah satu partai yang mengikuti pemilu tahun 1955.

Pasca pemilu tahun 1955, keterlibatan Muhammadiyah dalam pemilu dapat terlihat jelas pada pemilihan Presiden 2004 yang merupakan arena suksesi kepemimpinan nasional pertama yang dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia. Syarifudin Jurdi dalam bukunya yang lain *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006* menyebutkan bahwa dalam masa pemilihan Presiden 2004 Muhammadiyah secara terbuka dan *all out* mendukung pencalonan Amien Rais sebagai capres yang didukung oleh PAN. Semua energi dari pusat sampai ke ranting tersedot mengurus politik, selain sumber daya manusia yang terkuras, juga finansial.⁹ Meskipun tidak berhasil mengantarkan Amien Rais sebagai Presiden Indonesia, pengaruh Muhammadiyah dalam perpolitikan nasional dipandang cukup besar oleh berbagai kalangan.

Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, Muhammadiyah secara organisasi menyatakan tidak akan memberikan dukungan khusus kepada salah satu calon pasangan. Dalam pernyataan resminya, pimpinan pusat Muhammadiyah menghimbau warga Muhammadiyah agar menggunakan hak pilihnya secara cerdas dengan pikiran dan kalbu yang jernih, *istiqamah* dalam menegakkan *khittah* dan kebijakan persyarikatan, memelihara *ukhuwah* dan menghindarkan diri dari perpecahan, tidak menggunakan amal usaha untuk kampanye, serta senantiasa menjunjung tinggi kepentingan dan martabat

⁹ Syarifudin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.442.

organisasi.¹⁰ Akan tetapi keterlibatan Amien Rais sebagai tokoh Muhammadiyah dan keterlibatan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sering dipandang sebagai partainya Muhammadiyah dalam mendukung pasangan Prabowo-Hatta dianggap berbagai kalangan akan memberikan pengaruh kepada warga Muhammadiyah dalam menentukan pilihan politiknya.

Penelitian ini sendiri akan dilakukan di Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan oleh dua faktor. Faktor pertama lebih melihat pada sisi historis di mana Kecamatan Gondomanan merupakan tempat dilahirkannya Muhammadiyah. Seperti yang diketahui bersama, Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di kampung Kauman, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan. Faktor ini menyebabkan kultur asli Muhammadiyah yang dimiliki oleh warga Muhammadiyah Kecamatan Gondomanan masih sangat melekat kuat. Faktor yang kedua adalah kondisi aktual bahwa Kecamatan Gondomanan merupakan basis utama Muhammadiyah di Kota Yogyakarta sehingga bisa dijadikan sebagai representasi warga Muhammadiyah secara umum.

Hasil rekapitulasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kecamatan Gondomanan menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-JK lebih unggul dibandingkan pasangan Prabowo-Hatta. Pasangan Jokowi-JK memperoleh suara sebanyak 5.848 (lima ribu delapan ratus empat puluh delapan) suara atau 61,6%

¹⁰ “Pernyataan Sikap PP Muhammadiyah tentang Pemilihan Umum Tahun 2014” pada poin ketujuh yang disampaikan pada tanggal 15 Januari 2014 di website resmi Muhammadiyah <http://www.muhammadiyah.or.id/>

dari total suara sah sedangkan pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 3.646 (tiga ribu enam ratus empat puluh enam) suara atau 38,4% dari total suara sah. Total suara sah yang masuk berjumlah 9.494 (sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat) suara.

Tabel 1.3 Hasil Rekapitulasi Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kecamatan Gondomanan

| NO | Nama Pasangan Calon | Jumlah Suara |
|-----------------|--|--------------|
| 1 | H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa | 3.646 |
| 2 | Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jussuf Kalla | 5.848 |
| Total Suara Sah | | 9.494 |

Sumber: Website Resmi KPUD Kota Yogyakarta, <http://www.kpu-jogjakota.go.id/>

Kemenangan pasangan Jokowi-JK di Kecamatan Gondomanan bisa dikatakan merupakan kejutan mengingat Kecamatan Gondomanan merupakan basis Muhammadiyah. Muhammadiyah yang oleh para pengamat politik dianggap cenderung lebih dekat dengan PAN tentu saja dipandang akan lebih menguntungkan pasangan Prabowo-Hatta dikarenakan PAN merupakan salah satu partai pengusung pasangan tersebut. Fenomena kemenangan pasangan Jokowi-JK di daerah yang merupakan basis Muhammadiyah tentu sangat menarik untuk dianalisa dengan menggunakan berbagai macam pendekatan dalam studi perilaku memilih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana perilaku memilih di kalangan warga Muhammadiyah Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran perilaku memilih di kalangan warga Muhammadiyah Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan pada umumnya, serta memperkaya kajian yang berkaitan dengan teori perilaku memilih dan juga pemilihan Presiden.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan bagi para kontestan politik dalam pemilihan umum untuk menyusun strategi guna memenangkan pemilu. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Muhammadiyah untuk menyusun program pendidikan politik bagi warganya.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian yang digunakan dalam mengeksplorasi rumusan masalah. Di dalam penelitian ini terdapat dua teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Kedua teori tersebut adalah partisipasi politik dan perilaku memilih.

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.¹¹

Selain definisi secara umum, terdapat pula beberapa definisi partisipasi politik yang disampaikan oleh para ahli. Herbert McClosky yang dikutip oleh Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.¹² Sementara itu Samuel Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh para warga negara dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat secara spontan, secara sinambung atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.¹³

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.367.

¹² *Ibid.*

¹³ Samuel P. Huntington and Joan Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, diterjemahkan oleh Sahat Simamora dengan judul *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal.4.

Partisipasi politik kemudian oleh beberapa ahli dibagi menjadi beberapa kategori. Pembagian yang paling umum dilakukan berdasarkan frekuensi dan intensitas. Selain berdasarkan frekuensi dan intensitas, kategorisasi juga dilakukan berdasarkan jumlah pelaku.

Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Ramlan Surbakti dalam bukunya membagi partisipasi politik kedalam empat kategori.¹⁴ *Pertama*, apatis, artinya adalah orang-orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*, spektator, artinya adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*, gladiator, artinya adalah mereka yang secara aktif mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. *Keempat*, pengkritik, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

Selain Milbrath dan Goel, ada pula Olsen yang memandang partisipasi politik sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Olsen membagi partisipasi politik ke dalam enam lapisan.¹⁵ Keenam lapisan tersebut yakni pemimpin politik, aktivis politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap, dan informasi politik lainnya kepada orang lain), warga negara, marjinal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan orang yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).

2. Perilaku Memilih (*Voting Behavior*)

Memilih adalah salah satu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik ini ditunjukkan dengan keikutsertaan seseorang dalam pemilihan umum (*voter*

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta:PT.Grasindo, 2010), hal.182-183.

¹⁵ *Ibid.*, hal.183.

turnout). Untuk ikut memilih salah satu calon dalam kontestasi politik, warga tidak memerlukan biaya, waktu yang lama serta minim resiko terlibat dalam konflik. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kegiatan memilih menjadi bentuk partisipasi yang paling banyak dilakukan oleh warga dalam sebuah negara demokrasi. Pertanyaan yang muncul dari aktivitas memilih tersebut adalah mengapa pemilih menjatuhkan pilihannya pada kontestan tertentu dan tidak memilih kontestan yang lain? Untuk menjawab pertanyaan tersebut setidaknya ada tiga pendekatan yang digunakan yakni pendekatan sosiologis, pendekatan sosial psikologis dan pendekatan pilihan rasional.

a. Pendekatan Sosiologis

Menurut Asfar (1993) yang dikutip oleh Adman Nursal dalam bukunya, pendekatan sosiologis dikenal sebagai model perilaku pemilih Mazhab Columbia.¹⁶ Cikal bakalnya berasal dari Eropa, model ini kemudian dikembangkan oleh para sosiolog Amerika Serikat yang mempunyai latar belakang Eropa, khususnya di Universitas Columbia. Menurut mazhab Columbia, pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial (usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, dan lainnya) memberi pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih. Kelompok-kelompok sosial itu memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang. Dalam banyak penelitian, faktor agama, aspek

¹⁶ Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal.55-56.

geografis (kedaerahan), dan faktor kelas atau status ekonomi (khususnya negara-negara maju) memang mempunyai korelasi nyata dengan perilaku pemilih.

Menurut Bone dan Ranney (1981) yang dikutip oleh Adman Nursal, ada tiga tipe utama pengelompokan sosial:¹⁷

1) Kelompok Kategorial

Kelompok Kategorial terdiri dari orang-orang yang memiliki satu atau beberapa karakter khas, tetapi tidak mengorganisasikan aktivitas politik dan tidak menyadari identifikasi dan tujuan kelompoknya. Setiap kelompok memiliki karakteristik politik yang berbeda. Secara umum, perbedaan perilaku politik setiap kategori terjadi karena masing-masing kategori memberi reaksi yang berbeda terhadap berbagai faktor berikut:

- Peristiwa politik, misalnya dampak kebijakan pemerintah menghapuskan subsidi makanan pokok lebih dirasakan para ibu dibandingkan kaum laki-laki karena dalam kultur Indonesia umumnya alokasi pengeluaran untuk bahan pokok diatur kaum ibu. Karena itu, kaum ibu lebih peka dengan isu-isu tersebut dibandingkan dengan kaum laki-laki.
- Pengalaman Politik, misalnya bagaimana heroisme dan pahit getir mempertahankan kemerdekaan, lebih dirasakan oleh pemilih usia tua dibandingkan dengan pemilih pemula. Karena itu, para pemilih yang berusia relatif tua lebih reaktif terhadap isu yang berkaitan dengan nasionalisme.

¹⁷ *Ibid.*, hal.56-58.

- Peran-peran sosial, misalnya, masih adanya anggapan bahwa masalah politik adalah urusan kaum laki-laki terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi, hingga pola pilihan politik ditentukan oleh para suami dan istri mengikuti pilihan suaminya.

Pengelompokan kategorial terbentuk berdasarkan faktor-faktor berikut:

- Perbedaan jenis kelamin
- Perbedaan usia
- Perbedaan pendidikan

2) Kelompok Sekunder

Kelompok sekunder terdiri dari orang-orang yang memiliki ciri yang sama yang menyadari tujuan dan identifikasi kelompoknya, dan bahkan sebagian membentuk organisasi untuk memajukan kepentingan kelompoknya. Kelompok sekunder mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan kelompok kategorial.

Kekuatan pengaruh kelompok sekunder kepada para anggotanya tergantung pada empat faktor psikologis. *Pertama*, kuat lemahnya identifikasi individual terhadap kelompok. Jika identifikasi seseorang dengan kelompoknya kuat, maka pengaruh kelompok terhadap individu tersebut akan kuat pula.

Kedua, berkaitan dengan lamanya seseorang menjadi anggota kelompok: semakin lama seseorang menjadi anggota suatu kelompok, maka semakin kuat keterlibatan psikologis yang bersangkutan dengan kelompok tersebut.

Ketiga, pengutamaan politik bagi para pemimpin suatu kelompok: semakin penting makna politik, maka semakin kuat para pemimpin tersebut mendesakkan tindakan politis tertentu untuk meningkatkan loyalitas kelompok. Keempat, tingkat kepentingan politik bagi anggota-anggota individual.

Kelompok-kelompok sekunder dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Pekerjaan
- Status sosio ekonomi dan kelas sosial
- Kelompok-kelompok etnis yang meliputi ras, agama dan daerah asal.

3) Kelompok Primer

Kelompok primer terdiri dari orang-orang yang sering dan secara teratur melakukan kontak dan interaksi langsung. Kelompok primer memiliki pengaruh yang paling kuat dan langsung terhadap perilaku politik seseorang, khususnya dari keluarga dan teman-teman dekat.

Mereka yang termasuk dalam kelompok primer adalah:

- Pasangan-pasangan suami isteri
- Orang tua dan anak-anak
- Kelompok bermain (*peer groups*)

b. Pendekatan sosial psikologis

Sementara peneliti pemilu dari Columbia School lebih mengkaitkan perilaku pemilih dengan konteks kemasyarakatan dimana individu tersebut bernaung, maka sekelompok ahli ilmu sosial dari University of Michigan di Ann

Arbor lebih menempatkan sang individu itu sendiri sebagai pusat perhatian mereka. Menurut Ann Arbor School, persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat atau tema-tema yang diangkat (pengaruh jangka pendek) sangat berpengaruh terhadap pilihan pemilu yang dijatuhkan. Selain itu, “keanggotaan psikologis” dalam sebuah partai yang dapat diukur dalam bentuk variabel identifikasi partai, turut mempengaruhi pilihan pemilu, hal mana merupakan hasil berbagai pengaruh jangka panjang. Oleh karena itu, keputusan pemilu masing-masing individu secara primer tidak ditentukan secara sosial struktural, melainkan lebih merupakan hasil pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap sang individu.¹⁸

Pendekatan sosial psikologis berusaha untuk menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu singkat. Hal ini berusaha dijelaskan melalui trias determinan, yakni identifikasi partai, orientasi kandidat dan orientasi isu/tema. Sementara itu faktor-faktor lainnya yang sudah ada terlebih dahulu (seperti misalnya keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu) dianggap memberi pengaruh langsung terhadap perilaku pemilih.¹⁹

c. Pendekatan rasional

Pendekatan rasional adalah pendekatan yang menekankan pada perhitungan biaya dan manfaat. Pendekatan ini juga merupakan jawaban atas kritik terhadap dua pendekatan sebelumnya yang dianggap belum mampu menjelaskan alasan kenapa sebagian pemilih merubah pilihannya dari pemilu

¹⁸ Dieter Roth, *Empirische Wahlforschung*, diterjemahkan oleh Denise Matindas dengan judul *Studi Pemilu empiris* (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit), hal.37.

¹⁹ *Ibid.*, hal.38.

sebelumnya. Salah satu kritik terhadap dua pendekatan sebelumnya disampaikan oleh V.O Key yang dikutip oleh Dieter Roth dalam bukunya, Key menuding bahwa kedua pendekatan yang selama ini berlaku, merendahkan rasionalitas manusia.²⁰

V.O. Key menjelaskan bahwa masing-masing pemilih menetapkan pilihannya secara retrospektif, yaitu dengan menilai apakah kinerja partai yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya. Penilaian ini juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah di masa lampau. Apabila hasil penilaian kinerja pemerintah yang berkuasa (juga bila dibandingkan dengan pendahulunya) positif, maka mereka akan dipilih kembali. Apabila hasil penilaiannya negatif, maka pemerintah tersebut tidak akan dipilih kembali.²¹

Pandangan rasional yang sedikit berbeda disampaikan oleh Anthony Downs.²² Menurut Downs pemilih tidak terlalu tertarik pada konsep politis sebuah partai, melainkan kepada keuntungan terbesar yang dapat ia peroleh apabila partai ini menduduki pemerintahan dengan partai lain. Untuk dapat memperkirakan atau menghitung keuntungan ini, yang diistilahkan oleh Downs sebagai “*utility maximation*”, pemilih harus memiliki informasi mengenai kegiatan partai di masa lalu dan apa yang mungkin dilakukan partai di masa yang akan datang.

Dari pendapat-pendapat tersebut didapat kesimpulan bahwa seseorang akan memilih salah satu kontestan apabila dipandang mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya dalam persoalan

²⁰ *Ibid.*, hal.48.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hal.49

ekonomi. Rasionalitas yang dikedepankan adalah kontestan yang dipilih akan mendatangkan keuntungan yang sebesar besarnya. Sehingga yang perlu dilakukan oleh kontestan adalah mengemas isu-isu atau program-program yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa mereka mampu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

F. Definisi Konsepsional

1. Partisipasi Politik

Partisipasi adalah perilaku dalam bentuk keikutsertaan dalam suatu proses atau kegiatan politik yang dapat diamati secara langsung dan bertujuan untuk mempengaruhi kondisi politik yang ada.

2. Perilaku Memilih

Perilaku memilih adalah aktivitas yang dilakukan oleh seorang warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dalam menentukan apakah akan ikut untuk berpartisipasi memilih atau tidak, dan jika iya, siapa kandidat yang akan dia pilih nanti beserta alasannya.

3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sarana untuk melakukan proses pengisian jabatan-jabatan publik seperti Presiden dan Wakil Presiden, kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

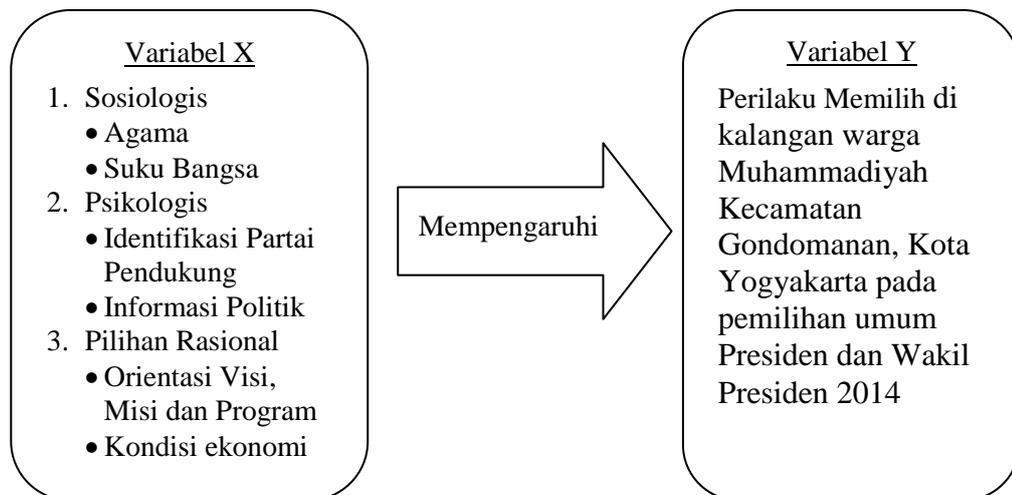
4. Pemilih

Pemilih adalah warga negara yang telah memenuhi syarat dan terdaftar dalam Daftar Pemilih dalam suatu pemilu.

G. Definisi Operasional

Menurut Sekaran yang dikutip oleh Juliansyah Noor dalam bukunya *Metodologi Penelitian*, definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep/variabel agar dapat diukur, dengan melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep/variabel. Dimensi (indikator) dapat berupa perilaku, aspek atau sifat/karakteristik.²³ Untuk memahami definisi operasional dalam penelitian ini, peneliti menyusun indikator-indikator yang berangkat dari variabel-variabel dalam penelitian. Indikator-indikator yang telah disusun dapat dilihat dalam **gambar 1.1**.

Gambar 1.1 Indikator variabel-variabel Perilaku Memilih di kalangan warga Muhammadiyah pada pemilihan umum Presiden 2014



1. Variabel X

a. Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis menitikberatkan pada karakteristik sosial dan pengelompokan sosial yang dipandang memberikan pengaruh pada perilaku memilih seseorang. Adapun indikator-indikator dari faktor sosiologis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), hal.97.

- Agama

Kesamaan agama merupakan salah satu dari karakteristik sosial yang dianggap menentukan dalam membentuk perilaku memilih seseorang.

- Suku Bangsa

Selain agama, suku bangsa juga merupakan salah satu indikator dalam pendekatan sosiologis yang memberikan pengaruh terhadap pemilih dalam menentukan pilihannya.

b. Faktor Psikologis

Faktor psikologis menekankan bahwa pengaruh-pengaruh jangka pendek terhadap individu pemilih yang akan menentukan perilaku memilih seseorang. Indikator-indikator dari faktor psikologis yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

- Identifikasi Partai Pendukung

Berdasarkan faktor psikologis, identifikasi partai pendukung merupakan indikator yang berpengaruh dalam menentukan perilaku memilih seseorang.

- Informasi Politik

Selain identifikasi partai pendukung, informasi politik terkait isu-isu politik yang diterima juga memegang peranan penting dalam mempengaruhi perilaku memilih.

c. Faktor Pilihan Rasional

Faktor pilihan rasional menitikberatkan pada prinsip *cost and benefit* yang dipegang oleh pemilih. Indikator-indikator dari faktor pilihan rasional yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Orientasi Visi, Misi dan Program

Dalam faktor pilihan rasional, visi, misi dan program dari kontestan yang dianggap dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi negara dipandang sangat berpengaruh terhadap perilaku memilih.

- Kondisi ekonomi

Selain orientasi visi, misi dan program, indikator dalam faktor pilihan rasional yang digunakan adalah pertimbangan kontestan yang dianggap dapat memperbaiki kondisi ekonomi individu pemilih.

2. Variabel Y

Variabel Y atau variabel yang dipengaruhi dalam penelitian ini adalah perilaku memilih di kalangan warga Muhammadiyah Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta pada pemilihan umum Presiden 2014.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif bermaksud membuat pemerian (penyandaraan) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu.²⁴ Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.²⁵

²⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal.4.

²⁵ Juliansyah Noor, *Op. cit.*, hal.38.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Ada dua faktor yang menyebabkan peneliti memilih Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Faktor pertama lebih melihat pada sisi historis dimana Kecamatan Gondomanan merupakan tempat dilahirkannya Muhammadiyah. Seperti yang diketahui, Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Kampung Kauman, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan. Faktor ini menyebabkan kultur asli Muhammadiyah yang dimiliki oleh warga Muhammadiyah Kecamatan Gondomanan masih sangat melekat kuat. Faktor yang kedua adalah kondisi aktual bahwa Kecamatan Gondomanan, merupakan basis utama Muhammadiyah di Kota Yogyakarta sehingga bisa dijadikan sebagai tolak ukur.

3. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi adalah seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh warga Muhammadiyah di Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan umum Presiden 2014. Warga Muhammadiyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warga Muhammadiyah kultural, yakni seluruh warga yang dalam kesehariannya

²⁶*Ibid.*, hal.147.

mempraktikkan kultur Muhammadiyah dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan Muhammadiyah.

Berdasarkan hasil pra-survei, peneliti tidak mendapatkan dokumen tertulis terkait jumlah warga Muhammadiyah di Kecamatan Gondomanan yang terdaftar dalam DPT. Menyikapi hal tersebut, peneliti melakukan sejumlah wawancara terhadap ketua Ranting Muhammadiyah di lingkup Kecamatan Gondomanan. Berdasarkan hasil wawancara, prakiraan jumlah warga Muhammadiyah yang termasuk ke dalam DPT adalah sejumlah 4.330 orang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Warga Muhammadiyah ranting Kauman berjumlah 3000 orang.²⁷
- Warga Muhammadiyah ranting Prawirodirjan berjumlah 500 orang.²⁸
- Warga Muhammadiyah ranting Ratmakan berjumlah 150 orang.²⁹
- Warga Muhammadiyah ranting Sayidan berjumlah 600 orang.³⁰
- Warga Muhammadiyah ranting Yudonegaran berjumlah 80 orang.³¹

b. Sampel dan Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proportionate stratified random sampling*. *Proportionate stratified random*

²⁷ Hasil wawancara bersama ketua ranting Muhammadiyah Kauman, H. M. Fursan, SE. Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 19 Oktober 2014 pukul 20.30 WIB bertempat di kantor Takmir Masjid Gede, Kauman.

²⁸ Hasil wawancara bersama ketua ranting Muhammadiyah Prawirodirjan, Wawan Budianto, S.Ag.,M.S.I. Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 17 Oktober 2014 pukul 19.30 WIB bertempat di kediaman yang bersangkutan.

²⁹ Hasil wawancara bersama ketua ranting Muhammadiyah Ratmakan, Istia Bakti Widodo. Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 19 Oktober 2014 pukul 19.30 WIB bertempat di kediaman yang bersangkutan.

³⁰ Hasil wawancara bersama ketua ranting Muhammadiyah Sayidan, Surachman. Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 19 Oktober 2014 pukul 19.00 WIB bertempat di kediaman yang bersangkutan.

³¹ Hasil wawancara bersama ketua ranting Muhammadiyah Yudonegaran, Drs. H. M. Danang Samsi, M.Sn. Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 19 Oktober 2014 pukul 20.00 WIB bertempat di kediaman yang bersangkutan.

sampling adalah teknik pengambilan sampling dengan memperhatikan strata (tingkatan) yang ada dalam populasi.³²

Untuk menentukan besarnya sampel penelitian, peneliti menggunakan rumus slovin. Cara menentukan jumlah sampel menggunakan rumus slovin adalah sebagai berikut:³³

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

n = Jumlah elemen/anggota sampel.

N = Jumlah elemen/anggota populasi.

e = *Error level* (tingkat kesalahan) (catatan: umumnya digunakan 1% atau 0,01; 5% atau 0,05; 10% atau 0,1)

Penelitian ini menggunakan *error level* 10%, maka dapat dihitung jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{4330}{1 + (4330 \times 0,1^2)}$$

$$n = 97,74 \approx 98$$

Setelah diketahui jumlah sampel dari populasi, selanjutnya jumlah sampel tersebut dibagi secara proporsional ke dalam tiap kelompok sampel. Pembagian kelompok sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada jumlah ranting Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Gondomanan yakni sejumlah lima ranting. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

³² Juliansyah Noor, *Op. cit.*, hal.152.

³³ *Ibid.*, hal.158.

n_i = Jumlah sampel setiap kelompok

n = Jumlah elemen/anggota sampel yang mewakili populasi.

N_i = Jumlah elemen/anggota populasi stiap kelompok.

N = Jumlah elemen/anggota populasi.

Berdasarkan rumus di atas maka dapat ditentukan jumlah sampel di setiap ranting Muhammadiyah sebagai berikut:

- Jumlah sampel ranting Kauman:

$$\frac{3.000}{4.330} \times 98 = 67,89 \approx 68$$

- Jumlah sampel ranting Prawirodirjan:

$$\frac{500}{4.330} \times 98 = 11,31 \approx 11$$

- Jumlah sampel ranting Ratmakan:

$$\frac{150}{4.330} \times 98 = 3,39 \approx 3$$

- Jumlah sampel ranting Sayidan:

$$\frac{600}{4.330} \times 98 = 13,57 \approx 14$$

- Jumlah sampel ranting Yudonegaran:

$$\frac{80}{4.330} \times 98 = 1,81 \approx 2$$

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket, wawancara dan dokumentasi.

a. Kuesioner/angket

Kuesioner/angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan

harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.³⁴ Adapun jenis daftar pertanyaan yang digunakan adalah daftar pertanyaan tertutup.

b. Wawancara

Selain menggunakan kuesioner/angket, penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Wawancara terhadap beberapa responden diperlukan untuk memperdalam informasi terkait beberapa indikator yang memang masih perlu dikaji lebih dalam.

c. Dokumen

Dokumen yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini adalah buku, peraturan perundang-undangan dan data dari internet yang koheren dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan analisa data peneliti tidak hanya menggunakan interpretasi terhadap data yang sudah diperoleh, tetapi peneliti juga menggunakan instrumen bantuan berupa aplikasi statistik yakni SPSS. Penggunaan SPSS dimaksudkan untuk meminimalisir tingkat kesalahan dalam penghitungan rekapitulasi data primer yang bersifat persentase serta untuk memudahkan peneliti dalam menyajikan hasil olahan data berbentuk tabel dan *bar chart*.

Adapun tahapan analisa data yang dilakukan melalui dua tahap utama. Tahap pertama dilakukan dengan mengolah data primer berupa kuesioner/angket yang telah diisi oleh sampel dengan menggunakan aplikasi SPSS yang akan menghasilkan informasi dalam bentuk tabel dan *bar chart* yang berisi persentase.

³⁴ *Ibid.*, hal.139.

Tabel dan *bar chart* yang dihasilkan merupakan hasil analisa terhadap setiap variabel dan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam kuesioner/angket. Tahap kedua adalah intepretasi peneliti terhadap informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SPSS. Intepretasi peneliti dituangkan dalam bentuk narasi.